



**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)
PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) HARAPAN BUNDAH DI DESA GUNUNG BUNDER I
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR
Tahun 2019**

Skripsi

Diajukan oleh:

Restiany Febria Darussalam
022117261

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
APRIL 202**



**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)
PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) HARAPAN BUNДАР DI DESA GUNUNG BUNDER I
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

Tahun 2019

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,
(Dr. Hendro Sasongko, Ak.,MM., CA)



Ketua Program Studi,
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak.,MBA., CMA., CCSA.,
CA.,CSEP., QIA)

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)
PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) HARAPAN BUNДАР DI DESA GUNUNG BUNDER I
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR
Tahun 2019**

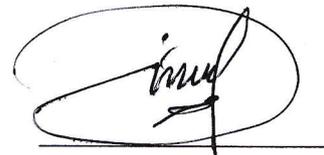
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Selasa Tanggal: 03 / Agustus / 2021

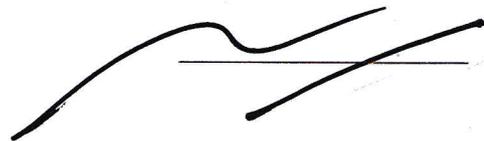
Restiany Febria Darussalam
022117261

Disetujui,

Ketua Sidang
(Ketut Sunarta, Ak, M.M., C.A.PIA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Hendro Sasongko, Ak, MM, CA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si.,
CMA., CAPM)



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Restiany Febria Darussalam

NPM : 02111761

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Bundar Di Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Tahun 2019”

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juni 2021



Restiany Febria Darussalam
021117261

**©Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Pakuan

ABSTRAK

Restiany Febria Darussalam. 022117261. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Bunder Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Tahun 2019. Di bawah bimbingan Hendro Sasongko dan Retno Martanti Endah Lestari. 2021.

Desa merupakan tempat yang sangat potensial bagi perekonomian Indonesia. Desa memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan seperti potensi sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian pedesaan. Besarnya potensi tersebut menuntut pemerintah khususnya pemerintah desa. Sehingga pemerintah telah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah yang berdampak pada perkembangan perekonomian Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pembentukan lembaga, yang biasa disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis mengenai bagaimana pelaporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Bunder Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. (2) Untuk menganalisis bagaimana penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Bunder Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. (3) Untuk menganalisis bagaimana memberikan penyelesaian atau solusi terhadap kendala yang di hadapi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Bunder Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Harapan Bunder Desa Gunung Bunder I kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan data kualitatif yang berhubungan dengan penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan diperoleh dengan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, catatan laporan bukti-bukti transaksi dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) laporan keuangan BUMDes Harapan Bunder belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Harapan Bunder menyajikan laporan keuangan yaitu hanya catatan buku kas umum dan laporan laba rugi saja. Sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. (2) pengakuan dan pengukuran penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dengan benar. (3) kendala-kendala dalam menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan: a. rendahnya pemahaman seluruh petugas BUMDes perihal SAK ETAP. b. Tidak ada pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan BUMDes Harapan Bunder. c. Kurangnya diadakan sosialisasi kepada BUMDes terkait Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP oleh Pemerintah ataupun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku pencetus standar ini. d. Belum ada pendampingan intensif yang terkait mengenai penerapan SAK ETAP.

Kata Kunci: SAK ETAP, BUMDes, Laporan Keuangan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HARAPAN BUNJAR DI DESA GUNUNG BUNDER I KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019”**.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentu saja terdapat hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun Alhamdulillah terlepas dari itu penulis tetap bersungguh-sungguh, semangat serta tiada henti berdoa dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam pembuatan skripsi ini segala proses di dalamnya penulis mendapatkan pencerahan, bantuan, dan petunjuk dari banyak pihak secara langsung dan tidak langsung.

Adapun skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini mendapatkan dukungan dan bantuan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT telah memberikan banyak sekali nikmat, karunia, hidayah, perlindungan, kesehatan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Almarhumah Mamah dan Almarhum Papah yang selalu memberikan materi untuk keberhasilan penulis sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Kakak-kakakku, para keponakanku, dan keluarga besar yang telah memberikan dorongan, semangat, dan doa selama penyusunan.
4. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
5. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak, MM., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. Chaidir., S.E., MM. dan Ibu Dr. Ir. Hj. Yuary Farradia, MSc. Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
7. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. Selaku Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

8. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak, MBA, CMA., CCSA., CA., CSEO., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
9. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E.,M.Si., CMA., CAPM. Selaku Dosen Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
11. Dosen-dosen Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat bagi saya.
12. Seluruh Staff Tata usaha dan pelaksana Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
13. Seluruh pengurus BUMDes Harapan Bundar yang telah memberikan bantuan dan kerja sama sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Teruntuk sahabatku sekaligus saudara perempuan Novia Firdhausya yang selalu memberikan *support* dan doa selama penyusunan penelitian ini.
15. Teruntuk sahabat-sahabatku SMP, SMA, dan Kuliah EUNOIA (Tania, Desi, Putri, Aini, Dendy, Ka tsani, Iqbal) yang sudah saling *support* dan doa.
16. Teruntuk teman-teman kelas G Akuntansi angkatan 2017 selama 3 tahun lebih selalu bersama, kelas yang penuh suka, duka serta semangat selama perkuliahan di kelas.
17. Teman-teman Organisasi HMA FE-Unpak yang mewarnai hariku dan berproses memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran diluar ilmu sks perkuliahan.
18. Teman-teman bimbingan semua dan seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi S1 Program Studi Akuntansi Tahun 2017 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini masih banyak sekali kekurangan karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga kekurangan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi kita semua.

Bogor, 16 April 2021

Penulis

Restiany Febria Darussalam

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
HAK CIPTA	v
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Maksud Penelitian.....	5
1.3.1 Maksud Penelitian.....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Akademis	6
1.4.2 Kegunaan Praktik	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Laporan Keuangan	7
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan	7
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan	7
2.1.3 Sifat Laporan Keuangan	8
2.1.4 Keterbatasan Laporan Keuangan	9
2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)	10
2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)	10
2.2.2 Perbandingan SAK Umum Dengan SAK ETAP	10
2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	11
2.2.4 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan	12
2.2.5 Kerangka Dasar Pengakuan Laporan Keuangan	12
2.2.6 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP	13
2.2.7 Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP	15
2.3 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	18

2.4.1.	Pengertian Badan Usaha Milik Desa	20
2.3.2	Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	19
2.4	Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	20
2.4.1.	Penelitian Sebelumnya	20
2.4.2.	Kerangka Pemikiran	24
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	25
3.2	Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	25
3.3	Jenis dan Data Penelitian	25
3.4	Operasionalisasi Variabel	26
3.5	Metode Pengumpulan Data	27
3.6	Metode Pengolahan / Analisis Data	27
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	29
4.1.1	Gambaran Umum Desa Harapan Bundar	29
4.1.2	Sejarah dan Perkembangan Pengelolaan BUMDES Harapan Bundar	29
4.1.3	Kegiatan Usaha	30
4.1.4	Struktur Organisasi	30
4.2	Pelaksanaan Penerapan SAK ETAP Laporan Keuangan pada BUMDes Harapan Bundar	30
4.3	Pecatatan Laporan Keuangan BUMDes Harapan Bundar Tahun 2019	31
4.3.1	Pencatatan Laporan Keuangan yang dibuat BUMDes Harapan Bundar Tahun 2019.....	32
4.4	Analisis Laporan Keuangan BUMDes Harapan Bundar dengan SAK ETAP	33
4.4.1	Pengakuan Akun Neraca BUMDes Harapan Bundar ...	33
4.4.2	Pengukuran Akun Neraca BUMDes Harapan Bundar..	34
4.4.3	Pengakuan Akun Laporan Laba Rugi BUMDes Harapan Bundar	37
4.4.4	Pengukuran Akun Laporan Laba Rugi BUMDes Harapan Bundar	38
4.4.5	Laporan Perubahan Ekuitas	39
4.4.6	Laporan Arus Kas	39
4.4.7	Catatan Atas Laporan Keuangan	39
4.4.8	Kendala yang dihadapi oleh BUMDes Harapan Bundar Dalam Penerapan SAK ETAP	40
4.4.9	Penyajian Laporan Keuangan BUMDes Harapan Bundar	40

BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan	44
5.2	Saran	45

DAFTAR PUSTAKA.....	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	50
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kelengkapan Penyajian Laporan Keuangan BUMDesa “Harapan Bundar” berdasarkan SAK ETAP.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	20
Tabel 3.1	Operasional Variabel Penelitian.....	26
Tabel 4.0	Laporan Keuangan Buku Kas Umum BUMDes Harapan Bundar Tahun 2019.....	32
Tabel 4.1	Laporan Laba Rugi BUMDes Harapan Bundar Tahun 2019	33
Tabel 4.2	Perbandingan Pengakuan Neraca BUMDes Harapan Bundar dengan ketentuan SAK ETAP	34
Tabel 4.3	Perbandingan Pengukuran Neraca BUMDes Harapan Bundar dengan ketentuan SAK ETAP	36
Tabel 4.4	Perbandingan Pengakuan Akun Laporan Laba Rugi BUMDes Harapan Bundar dengan ketentuan SAK ETAP.....	37
Tabel 4.5	Perbandingan Pengukuran BUMDes Harapan Bundar dengan ketentuan SAK ETAP	38
Tabel 4.6	Laporan Neraca BUMDes Harapan Bundar 2019.....	40
Tabel 4.7	Laporan Laba BUMDes Harapan Bundar 2019	41
Tabel 4.8	Laporan Perubahan Ekuitas BUMDes Harapan Bundar 2019	42
Tabel 4.9	Laporan Arus Kas BUMDes Harapan Bundar 2019	42
Tabel 5.0	Catatan Atas Laporan Keuangan BUMDes 2019 Harapan Bundar ...	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	24
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan keuangan.....	54
Lampiran 2 Dokumentasi Foto.....	55
Lampiran 3 Hasil Wawancara	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan merupakan ciri dari pertumbuhan ekonomi yang pesat, oleh karena itu akuntansi mempunyai peran tertentu sebagai sistem informasi keuangan untuk melaporkan status keuangan suatu perusahaan. Perusahaan harus mampu menyusun laporan keuangan untuk memberikan pengguna informasi yang dibutuhkan oleh pengguna internal dan eksternal. Dengan pesatnya perkembangan perekonomian, peran akuntansi sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang transaksi keuangan menjadi semakin penting. Setiap perusahaan harus menyusun laporan keuangan, karena laporan keuangan yang disiapkan memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna internal dan eksternal perusahaan. Untuk itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standar penyusunan laporan keuangan. Standar penyusunan laporan keuangan tersebut berupa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan bantuan standar tersebut maka penyusunan laporan keuangan dapat dipermudah.

SAK ETAP berlaku untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011. SAK berdasarkan IFRS (SAK Umum) berlaku untuk entitas dengan tanggung jawab publik utama dan entitas yang melakukan banyak kegiatan lintas negara, IFRS umum ini sulit untuk dipahami dan diterapkan. Untuk itu sebagian besar usaha kecil dan menengah di Indonesia, hal ini serupa dengan yang memiliki persyaratan pelaporan yang lebih kompleks. Dibandingkan dengan SAK, SAK ETAP memberikan banyak kemudahan bagi entitas. Dalam ruang lingkup SAK ETAP, standar dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki tanggung jawab publik. Entitas tanpa tanggung jawab publik yang relevan adalah entitas yang tidak memiliki tanggung jawab publik utama, dan umumnya meliris laporan keuangan kepada pengguna eksternal. Standar-standar ini diharapkan memiliki ketentuan dan dapat menerapkan serta menyesuaikan ketentuannya untuk mencapai pelaporan keuangan yang andal serta menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan globalisasi bahasa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun diharapkan akan diaudit dan diperoleh opini audit yang akan memperluas peluang perolehan dana.

Desa merupakan tempat yang sangat potensial bagi perekonomian Indonesia. Desa memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan seperti potensi sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian pedesaan. Besarnya potensi tersebut menuntut peran pemerintah khususnya pemerintah daerah. Sehingga pemerintah telah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah yang berdampak pada perkembangan perekonomian

Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pembentukan lembaga yang biasa disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut ('Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.11 Tentang Badan Usaha Milik Desa', 2021) BUMDes merupakan badan hukum yang di dirikan oleh desa guna mengelola aset, jasa dan usaha lainnya, sehingga memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang memiliki ciri yang di dalamnya terdapat perdesaan yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat perdesaan.

('Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.11 Tentang Badan Usaha Milik Desa', 2021) menegaskan bahwa BUMDes dibentuk untuk memanfaatkan segala potensi ekonomi serta potensi ekonomi serta potensi sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu indikatornya adalah penerapan prinsip akuntansi yang benar pada BUMDes melalui perlakuan akuntansi yang benar dan tepat. Maka dari itu penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan juga harus berpedoman pada standar keuangan, agar laporan keuangan yang di sampaikan dapat di percaya oleh semua pihak. Dalam pengelolaan laporan keuangan BUMDes, sebagian dari masyarakat harus memperhatikan standar keuangan yang digunakan, terutama dalam penyusunan laporan keuangan, masih belum mencantumkan SAK ETAP. Pelaksanaan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes mesti mencermati dengan serius standar keuangan yang digunakan. Artinya dalam hal penyusunan laporan keuangannya, BUMDes wajib mengacu pada pedoman umum ialah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ataupun sering di sebut dengan istilah SAK ETAP. Seperti halnya yang di tulis oleh Arif Amarudin dalam artikel Laporan Keuangan BUMDes Harus Berbasis SAK ETAP (Amarudin, 2019) melalui teknis laporan keuangan BUMDes, dengan menggunakan SAK ETAP dianggap cocok bagi desa. Dalam SAK ETAP, laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan lengkap entitas meliputi: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penerapan SAK ETAP dalam laporan keuangan yang di susun oleh BUMDes dapat memudahkan dalam penyajian laporan keuangan tersebut.

Di Jawa Barat sejak dibuatnya peraturan BUMDesa telah dilakukan upaya pengembangan BUMDesa untuk menjadikan desa sebagai fondasi penguatan ekonomi daerah. Pembentukan BUMDesa sendiri telah disesuaikan dengan karakteristik lokal dan perekonomian desa yang ada. Melalui adanya pendirian BUMDesa menyesuaikan dengan adanya usaha dari desa tersebut seperti misalnya pariwisata, simpan pinjam, produksi kerajinan, sembako ataupun pembayaran tagihan secara online. Salah satunya merupakan BUMDesa di Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya memperluas program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk meningkatkan kesenjangan tersebut. Masalah yang dialami oleh BUMDes Harapan bundar yaitu mengenai penyusunan laporan keuangan yang kurang baik. Seperti yang dikatakan oleh Bupati Bogor Ade Yasin

(*Baru Dua Bumdes Maju, Bupati Bogor: Maksimalkan*, 2019) Pemerintah Bogor membutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang tersebut, peningkatan Sumber Daya Manusia diperlukan untuk memaksimalkan potensi peningkatan BUMDes di Kabupaten Bogor. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus berkontribusi dalam meningkatkan daya tarik bisnis sebagai salah satu peluang investasi untuk pertumbuhan ekonomi desa. Ade Yasin juga mengungkapkan (diskominfo, 2019), dari 416 desa di bumi, Tegar Beriman baru 280 diantaranya memiliki BUMDes dan hanya 183 BUMDes dinyatakan aktif. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dari 183 BUMDes yang aktif baru dua yang berkategori maju. Selebihnya ada pula 22 BUMDes berkategori berkembang. Sisanya 165 berkategori dasar.

BUMDes Harapan Bundar di Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan merupakan salah satu desa di Kabupaten Bogor. Untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut, maka terbentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Bundar yang saat ini bertujuan untuk dapat menunjang perekonomian dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. BUMDes Harapan Bundar bergerak dalam usaha PPOB (*Payment Point Online Bank*) merupakan suatu loket layaknya bank yang dapat digunakan untuk membayar berbagai tagihan dalam satu tempat seperti misalnya pembayaran listrik, BPJS, pulsa, iuran sekolah ataupun transfer uang antar bank. BUMDes Harapan Bundar sudah berdiri sejak tahun 2017 akan tetapi baru mulai aktif pada tahun 2018. Bumdes Harapan Bundar telah terpilih menjadi lokasi pembedayaan BUMDes, bukan berarti BUMDes Harapan Bundar di Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor tidak mengalami kendala, ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji didalam BUMDes Harapan Bundar salah satunya laporan keuangan yang selama ini telah mereka susun. Apakah sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai standar akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Berikut ini adalah laporan keuangan BUMDesa Harapan Bundar berdasarkan format tampilan laporan keuangan SAK ETAP, dan datanya diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BUMDesa.

Tabel 1.1
Data Kelengkapan Penyajian Laporan Keuangan BUMDes Harapan Bundar berdasarkan SAK ETAP

No.	SAK ETAP	BUMDes Harapan Bundar
1.	Neraca	Tidak Ada
2.	Laporan Laba Rugi	Ada
3.	Laporan Perubahan Ekuitas	Tidak Ada
4.	Laporan Arus kas	Tidak Ada
5.	Catatan atas Laporan Keuangan	Tidak Ada

Sumber : wawancara penulis (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1. BUMDes Harapan Bundar pada penyusunan laporan keuangan masih belum sesuai dengan SAK ETAP, umumnya pengurus BUMDes hanya memberikan laporan perhitungan laba/ rugi yang dihitung sendiri tetapi tidak

menyajikan laporan keuangan dengan rinci atas seluruh pendapatan serta pengeluaran dalam periode berjalan sejak awal BUMDes Harapan Bundar berdiri. Perihal ini disebabkan minimnya sumber daya manusia dan minimnya pengetahuan dalam penataan laporan keuangan yang benar dengan standar laporan keuangan akuntansi, BUMDes Harapan Bundar kekurangan tenaga pakar dalam mengelola administrasi serta keuangan BUMDes.

Penelitian dari Jayanti, Masyhad, Qomari dalam penelitiannya yang berjudul *Analisi Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa sidoarjo* (2018) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan atas berbagai transaksi yang dilakukan penggolongan transaksi pada BUMDesa “Surya Sejahtera” belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDesa “surya Sejahtera” menyajikan laporan keuangan hanya tiga jenis yaitu: neraca, laporan laba rugi dan kas. Sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis laporan yaitu : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Serta berdasarkan penelitian yang dilakukan Jerry Sonny Lintong, Esrie A.N. Limpeleh, Barno Sungkowo (2020) dalam penelitiannya mengenai Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes “Kineauan” Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan menghasilkan simpulan bahwa pencatatan atas transaksi laporan kas harian, yang menggambarkan kas masuk dan kas keluar. Hal ini tidak di ketahui neraca akhir periode dan tidak diketahui keuntungan atau kerugian entitas pada periode tertentu. Menyebabkan BUMDes “Kineauan” belum sesuai dengan SAK ETAP yang terdapat lima jenis laporan keuangan yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Widyaishwara Pusdiklat KNPK Bapak Izzudin dalam artikel (*Laporan Keuangan BUMDesa*, 2020) Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Untuk menyusun Laporan Keuangan BUMDes. Kementerian Keuangan menyediakan pedoman tentang laporan keuangan BUMDes. Laporan keuangan yang harus di kelola oleh pengelola BUMDes yaitu berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Bundar Desa Gunung Bunder dalam menyusun laporan keuangannya masih belum sesuai dengan SAK ETAP, biasanya pengurus BUMDes hanya memberi laporan perhitungan laba/rugi yang di peroleh saja kepada Kepala Desa namun tidak menyajikan laporan keuangan dengan rinci atas segala pemasukan dan pengeluaran tanpa merincikan sumber pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dalam periode berjalan, maka hal ini akan menimbulkan masalah ketika dana BUMDes yang dikelola dari kegiatannya dikelola apa adanya,

tanpa melalui proses pencatatan yang berdasarkan dengan SAK ETAP. Dalam identifikasi masalah ini maka penulis tertarik untuk menganalisis penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan BUMDes Harapan Bundar di Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Bundar Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2019?
2. Bagaimana penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Bundar Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Tahun 2019?
3. Bagaimana solusi yang dihadapi dalam menyelesaikan kendala di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Bundar Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Tahun 2019?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan SAK ETAP pada BUMDes Harapan Bundar Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga sebagai upaya pengembangan dan penerapan ilmu yang didapatkan oleh penulis selama di bangku perkuliahan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada perumusan masalah di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Bundar Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tahun 2019.
2. Untuk menganalisis penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Bundar Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.
3. Untuk menganalisis bagaimana memberikan penyelesaian atau solusi terhadap kendala yang dihadapi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Bundar Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan setelah terungkapnya hasil penelitian ini bagi banyak pihak, kegunaan yang diharapkan diantaranya sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengaplikasikan variabel penelitian ini untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada, agar dapat meningkatkan nilai usaha, serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pada masa yang akan datang.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu terutama di bidang akuntansi dan disiplin ilmu lainnya. Serta dapat dijadikan sumber atau referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya, yang akan mengembangkan penelitian dengan pembahasan yang sama yaitu penerapan SAK ETAP Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Bunder Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Laporan Keuangan

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dapat memperlihatkan gambaran bagaimana kondisi keuangan dalam perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan ialah salah satu sumber data yang berarti untuk para penggunanya, paling utama dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan keuangan hendak jadi lebih berguna apabila data yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut bisa digunakan buat memprediksi apa yang hendak terjalin pada masa mendatang, lewat sesuatu proses perbandingan, penilaian, serta analisis trend. Hery (2018)

Menurut (Kasmir,2018) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015) laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sedangkan menurut (Munawir, 2014) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil – hasil yang telah di capai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Menurut (Sugiono dan Untung, 2016) laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak-pihak yang ada di dalam (internal) perusahaan maupun pihak-pihak yang berada diluar (eksternal) perusahaan. Oleh karena itu laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan dan karena inilah maka laporan keuangan sering di sebut juga “*language of business*”. Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan salah satu media komunikasi data keuangan atau aktivitas dari perusahaan, untuk pertanggungjawaban di antara perusahaan dan para pemilikny serta pihak yang lain.

2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Pada dasarnya, laporan keuangan dirancang untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu laporan keuangan yang ditetapkan sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) menyatakan bahwa tujuan

dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan.

Menurut (Kasmir, 2018) menjelaskan secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan atau perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Sedangkan menurut (Septiana, 2019) laporan keuangan juga dapat disusun sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Intinya adalah laporan keuangan mampu memberikan, informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan, yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini akan di paparkan tentang beberapa tujuan penyusunan laporan keuangan, yaitu antara lain:

1. Menginformasikan jenis dan jumlah harta untuk menghitung berapa banyak harta yang dimiliki perusahaan (ditekankan pada perusahaan/ badan bisnis, bukan kepada para pemiliknya secara personal), dibutuhkan perhitungan yang tepat
2. Menginformasikan jenis dan jumlah kewajiban dan modal konsepnya sama seperti informasi kekayaan perusahaan, laporan keuangan juga menginformasikan adanya utang atau kewajiban, serta modal yang dimiliki dan dilaporkan dalam konversi mata uang yang digunakan.
3. Menginformasikan jenis dan jumlah pendapatan dalam bisnis, adanya uang masuk tidak selalu berarti pendapatan.
4. Menginformasikan jenis dan jumlah pengeluaran
5. Menginformasikan perubahan yang terkait dengan harta, kewajiban dan modal perusahaan harus dilaporkan melalui laporan keuangan.
6. Merefleksikan kinerja manajemen melalui laporan tahunan bisa dikatakan sebagai laporan untuk menilai kinerja dari perusahaan di periode tertentu.
7. Menginformasikan catatan laporan keuangan juga akan menyertakan catatan yang terkait dengan laporan keuangan itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan sebagai sarana informasi yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi.

2.1.3. Sifat Laporan Keuangan

Pencatatan yang dilakukan saat menyiapkan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Demikian pula penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan tersebut.

Menurut (Kasmir, 2018) sifat laporan keuangan adalah:

1. Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari masa lalu atau masa yang sudah terlewati dari masa sekarang. Misalnya

laporan keuangan yang disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).

2. Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian – sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

Menurut (Munawir, 2014) sifat laporan keuangan adalah:

1. Fakta yang telah dicatat (*record fact*) berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank, jumlah piutang, persediaan barang dagang, hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Pencatatan dari pos-pos ini berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dan jumlah uang yang tercatat dalam pos-pos itu dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut (*at original cost*)
2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi (*accounting covention an postulate*) berarti data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (*General Accepted Accounting Principles*); hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan untuk keseragaman.
3. Pendapat pribadi (*Personal judgment*) dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konveksi-konveksi dan dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan yang sudah menjadi standar praktik pembukuan, namun penggunaan dari konveksi-konveksi dan dalil dasar tersebut tergantung dari akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. Pendapat ini tergantung kepada kemampuan atau integritas pembuatannya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan digunakan di dalam beberapa hal.

Dapat disimpulkan bahwa sifat laporan keuangan dapat diartikan sebagai suatu informasi yang harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya, di mana informasi harus dapat dimengerti oleh pengguna.

2.1.4. Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2018) keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan yaitu:

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (*historis*), dimana data-data yang diambil dari data masa lalu.
2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu saja.

3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta dan pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling rendah.
5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya.

Sedangkan menurut (Munawir, 2014) laporan keuangan itu mempunyai beberapa keterbatasan antara lain:

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan yang final.
2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah – ubah.
3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, di mana daya beli (*purchasing power*) uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga di ikuti kenaikan tingkat harga-harga.
4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor – faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang

2.2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

2.2.1. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020) “Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang di peruntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP disahkan oleh 18 orang anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009 di Jakarta. SAK ETAP terdiri atas 30 bab dan dilengkapi dengan daftar istilah di bagian akhir.

Entitas yang disajikan menggunakan SAK ETAP adalah yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat dalam pengelolaan usaha, kreditur dan pemingkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek pasar modal ; atau
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP adalah entitas yang tidak tercatat di bursa atau bukan perusahaan publik. Jika terdapat otorisasi untuk menetapkan regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP, entitas yang memiliki tanggung jawab publik dapat menggunakan SAK ETAP. Prioritas harus diberikan pada pentingnya pemahaman SAK-ETAP sebelum digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Apabila terdapat kurangnya pengetahuan, maka akan mengakibatkan penurunan kualitas dan ketepatan waktu laporan, serta menurunkan daya saing entitas terkait di bidang usaha.

2.2.2. Perbandingan SAK UMUM dengan SAK ETAP

Menurut (Rini, 2015) salah satu perbedaan dasar antara SAK Umum dengan SAK ETAP adalah komponen laporan keuangan yang terdapat di dalamnya. SAK ETAP masih menggunakan istilah neraca. Sedangkan pada SAK Umum, neraca berganti nama menjadi laporan posisi keuangan. Selain itu, pada SAK ETAP hanya menggunakan laporan laba rugi komprehensif. Untuk laporan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, baik SAK ETAP maupun SAK Umum sama-sama menggunakan ketiga laporan ini.

Dari sisi pengukuran, SAK ETAP menggunakan *historical cost* dan nilai wajar, sedangkan SAK Umum menggunakan *historical cost*, biaya kini, nilai realisasi bersih dan nilai sekarang. Selain itu, dalam penilaian asset SAK ETAP hanya dapat menggunakan menggunakan *historical cost* dan baru bisa melakukan revaluasi bilaizinkan. Sedangkan pada SAK Umum dapat memilih untuk menggunakan *historical cost* atau revaluasi, tergantung metode mana yang dianggap lebih relevan dan andal. Perbedaan terpenting selanjutnya adalah ada tidaknya konsep pemeliharaan modal. Karena SAK ETAP merupakan SAK “khusus” yang diperuntukan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, maka tidak perlu menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan

mengenai kondisi modal perusahaan dan dividen secara detail. Selain itu, perbedaan SAK ETAP dan SAK Umum terapat pada pengakuan aset tak berwujud. SAK ETAP hanya mengakui aset tak berwujud yang memiliki umur terbatas, sedangkan SAK Umum mengakui aset tak berwujud yang memiliki umur terbatas, sedangkan SAK Umum mengakui aset tak berwujud dengan umur manfaat yang tidak terbatas. Sama halnya dengan pengakuan *goodwill*. SAK ETAP hanya menggunakan metode *historical cost*, sedangkan SAK Umum bisa menggunakan metode *historical cost* atau revaluasi. Entitas yang menerapkan SAK Umum benar-benar memperhitungkan adanya indikasi pengurangan nilai dari aset tak berwujud.

2.2.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut (Hery, 2018) agar informasi akuntansi yang objektif harus memenuhi karakteristik kualitatif yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna. Empat karakteristik kualitatif utama pelaporan keuangan adalah:

1. Dapat dipahami
Diasumsikan bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang cukup tentang ekonomi dan kegiatan bisnis, akuntansi, dan bersedia mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun, informasi rumit yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikesampingkan hanya karena sulit dipahami oleh sebagian pengguna.
2. Relevan
Jika informasi memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan, mengonfirmasi, dan mengoreksi hasil evaluasi masa lalu mereka, itu relevan. Relevansi informasi dapat dipengaruhi oleh substansi dan kepentingannya.
3. Keandalan
Jika informasi tidak memiliki ide yang menyesatkan, kesalahan besar, dan dapat dipercaya oleh pengguna, dapat dikatakan sebagai pernyataan yang tulus atau jujur bahwa informasi tersebut harus atau dapat secara wajar diharapkan, maka informasi tersebut memiliki kekuatan yang dapat diandalkan.
4. Dapat diperbandingkan
Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan dari berbagai periode untuk mengidentifikasi status keuangan dan tren kinerja. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan kejadian serupa lainnya harus dilakukan secara konsisten selama perusahaan yang sama dan antar perusahaan yang berbeda.

2.2.4. Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020) Pengukuran adalah proses penentuan jumlah yang digunakan entitas untuk mengukur aset, liabilitas, pendapatan, dan pengeluaran dalam laporan keuangan. Proses ini mencakup pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar yaitu:

1. Biaya historis
Aset mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan, atau nilai wajar pembayaran yang dibayarkan untuk memperoleh aset untuk pembelian. Liabilitas dicatat sebesar nilai wajar setara kas yang diterima atau aset non-kas yang diterima sebagai ganti liabilitas pada saat dihasilkan.
2. Nilai wajar
Nilai wajar mengacu pada jumlah uang yang digunakan untuk menukar aset atau melunasi hutang antara pihak yang berkepentingan dan berpengetahuan dalam transaksi yang adil.

2.2.5. Kerangka Dasar Pengakuan Laporan Keuangan

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020) kerangka dasar dalam pengakuan dan pengukuran laporan keuangan sebagai berikut yaitu:

1. Dasar AkruaI
Entitas wajib menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan memakai dasar akruaI. Dalam dasar akruaI, pos-pos diakui selaku peninggalan, kewajiban, ekuitas, pemasukan serta beban unsur-unsur laporan keuangan kala penuh definisi serta kriteria pengakuan pos-pos tersebut.
2. Aset
Aset diakui dalam neraca bila mungkin khasiat ekonominya di masa depan hendak mengalir ke entitas serta peninggalan tersebut memiliki nilai ataupun bayaran yang bisa diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca bila pengeluaran sudah terjalin serta khasiat ekonominya sudah ditatap tidak bisa jadi mengalir ke dalam entitas sehabis periode pelaporan berjalan. Selaku alternatif transaksi tersebut memunculkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.
3. Kewajiban
Kewajiban diakui dalam neraca bila mungkin pengeluaran sumber energi yang memiliki khasiat ekonomi hendak dicoba untuk menuntaskan kewajiban masa saat ini, serta jumlah yang wajib dituntaskan bisa diukur dengan andal.
4. Penghasilan
Pengakuan pemasukan ialah akibat langsung dari pengakuan aset serta kewajiban. Pemasukan diakui dalam laporan laba rugi bila peningkatan

khasiat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset ataupun penyusutan kewajiban sudah terjalin serta bisa diukur secara andal.

5. Beban

Pengakuan pemasukan ialah akibat langsung dari pengakuan aset serta kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi bila penurunan khasiat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset ataupun peningkatan kewajiban sudah terjadi serta bisa diukur secara andal.

6. Laba dan Rugi

Laba dan rugi merupakan selisih aritmatika secara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan termasuk unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan “*matching concept*”.

2.2.6. Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020) kita dapat mengetahui bahwa penyajian laporan yang benar menurut SAK ETAP sebagai berikut:

1. Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar neraca, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperluas, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas laporan keuangan dan kinerja keuangan entitas.

2. Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika memenuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

3. Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen

menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, sehingga entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut.

4. Frekuensi Laporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir tahun periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

- a. Fakta tersebut;
- b. Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; dan
- c. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan.

5. Pernyataan yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- a. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau.
- b. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.

Jika penyajian atas pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mengklasifikasikan jumlah komparatif kecuali jika klasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasikan:

- a. Sifat reklasifikasi;
- b. Jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasikan; dan
- c. Alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan:

- a. Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan
- b. Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasikan.

6. Informasi Komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam

laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

7. Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat memengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

2.2.7. Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP

1. Neraca

Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya;
- c. Persediaan;
- d. Properti investasi;
- e. Aset tetap;
- f. Aset tidak berwujud;
- g. Utang usaha dan utang lainnya;
- h. Aset dan kewajiban pajak;
- i. Kewajiban diestimasi;
- j. Ekuitas.

Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan;
- b. Beban keuangan;
- c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- d. Beban pajak;
- e. Laba atau rugi neto.

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajiannya tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”. Baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Laporan Saldo Laba

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a. Laba atau rugi untuk periode;
- b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui;
- d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
 - 1) Laba atau rugi;
 - 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
 - 3) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik entitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik entitas, dan perubahan kepemilikan dalam entita anak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

4. Laporan Arus Kas

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

a. Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang memengaruhi penetapan laba rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- 1) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
- 2) Penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi, dan pendapatan lain;
- 3) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
- 4) Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan;
- 5) Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
- 6) Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi.

b. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan oengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan, contoh arus kas yang berasal dari investasi adalah:

- 1) Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk set tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
- 2) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
- 3) Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam *join venture* (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);
- 4) Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari *join venture* (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);
- 5) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
- 6) Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;

c. Aktivitas Pendanaan

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

- 1) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain;
- 2) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas;
- 3) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya;
- 4) Pelunasan pinjaman;
- 5) Pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus:

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan;
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP;
2. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan;

3. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut;
4. Pengungkapan lain.

2.3 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.3.1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut (Ibrahim, 2018) Pedesaan merupakan salah satu potensi perekonomian Indonesia. Desa memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, seperti potensi sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian pedesaan. Besarnya potensi tersebut menuntut pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk berperan. Sehingga pemerintah telah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah yang berdampak pada perkembangan perekonomian Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pembentukan lembaga yang biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sedangkan menurut (Ridlwan, 2015) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga ekonomi yang modal komersialnya didirikan atas prakarsa masyarakat pedesaan untuk menjadi desa yang lebih mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun (2021) tentang Badan Usaha Milik Desa, dasar hukumnya menetapkan: "BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung, dan modal langsung desa-desa tersebut berasal dari aset desa yang terpisah untuk manajemen Aset, layanan, dan bisnis lain yang membawa manfaat sebesar mungkin bagi masyarakat pedesaan". Dengan demikian, dana yang harus dikeluarkan harus berasal dari masyarakat pedesaan itu sendiri. Namun, BUMDes bisa saja menerima dana dari pihak luar. Misalnya dari pemerintah dan pihak lain. BUMDes merupakan badan usaha yang dapat membantu masyarakat dalam segala aspek, seperti memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan membuka wawasan masyarakat desa agar dapat bersaing dengan masyarakat lainnya.

2.3.2. Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktik rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwan, 2015).

Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes (Ridlwan, 2015), adalah (1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik (2) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan

usaha BUMDes (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus di pertanggungjawabkan; dan (6) Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes. Menurut (Ridlwani, 2015) diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:

1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang, dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal;
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;
3. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan
4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya.

2.4 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.4.1. Penelitian Sebelumnya

Table 2.1
Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	(Andriani, Atmadja and Sinarwati, 2014) Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis Sak Etap Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) (Sebuah Studi Intrepetatif Pada Peggy Salon)	Variabel independent: SAK ETAP Variabel dependen: Pencatatan keuangan pada UMKM (Sebuah Studi Intrepetatif pada Peggy Salon)	Indikator: Laporan keuangan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Sistem pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, alasan membuat pencatatan keuangan adalah untuk mempermudah pemilik dalam memberikan bonus kepada karyawannya, 2) Faktor yang menyebabkan gagalnya SAK ETAP pada Peggy Salon karena adanya

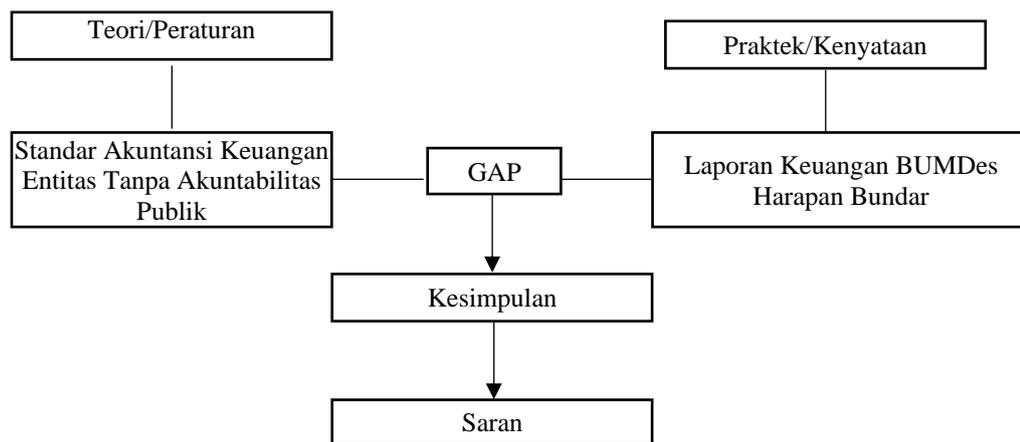
No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					faktor internal berupa kurangnya pemahaman, kedisiplinan dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternalnya karena kurangnya pengawasan dari stakeholder yang berkepentingan dengan laporan keuangan.
2	(Widiyastuti, 2017) Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bidang Jasa	Variabel Independent : SAK ETAP Variable Dependens : Laporan keuangan UMKM di bidang jasa	Laporan keuangan	Deskriptif pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana yang disebabkan kurangnya pengetahuan pengusaha terhadap tujuan, manfaat dan tahapan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP. Berdasarkan hasil penelitian, perlu ada penyuluhan penerapan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP bagi para pelaku usaha sektor UMKM.
3	(Norkamsiah, Kesuma and Setiawaty, 2016) Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Penyusunan Laporan Keuangan pada perusahaan CV Aba Komputer	Variabel Independent : SAK ETAP Variabel Dependens : Laporan Keuangan pada perusahaan CV Aba Komputer	Laporan Keuangan	Penelitian kualitatif dengan studi kasus	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh CV Aba Komputer belum menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP) dalam hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber manusia yang dimiliki.
4	(Singal, Ribka Agustine. Pinatik, 2015)	Variabel Independent : SAK ETAP Variabel Dependens : Evaluasi Penyusunan Laporan Laba Rugi Pada Pt.Karunia Multiguna Abadi	Laporan Keuangan	Deskriptif komparatif Metode Data primer dan sekunder	Hasil penelitian berdasarkan penyajian laporan neraca dan laba rugi yang dibuat oleh PT.Karunia Multiguna Abadi pada bulan September tahun 2015 masih belum sesuai dengan kaidah SAK ETAP dan masih ada pengklasifikasian pos akun yang belum disajikan, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki. Sebaiknya manajemen perusahaan mempekerjakan karyawan

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					yang terampil dalam bidang akuntansi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan laporan keuangan.
5	(Ponomban, Yohanes. C. Saerang, David P.E. Wangkar, 2016) Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak-Etap Pada Cv. Bahu Bahtera Indah Manado	Variabel Independent: SAK ETAP Variabel Dependen : Laporan Keuangan Pada Cv. Bahu Bahtera Indah Manado	Laporan Keuangan	Deskriptif Kualitatif Metode Menjelaskan apa yang tampak dalam penelitian tersebut	Dari hasil penelusuran dan analisis terhadap 1. 1. CV. Bahu Bahtera Indah Manado mengenai penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di peroleh kesimpulan bahwa dalam penyajian laporan keuangan CV. Bahu Bahtera Indah Manado masih banyak perbedaan atau ketidaksesuaian dengan SAK-ETAP. Bahkan ada juga laporan-laporan keuangan yang tidak di terbitkan oleh CV. Bahu Bahtera Indah Manado padahal perlu di terbitkan menurut SAK-ETAP yaitu penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya ,dan juga uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
6	(Zainal, 2019) Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan KSU Sumber Rezeki Kota Binjai	Variabel Independent : SAK ETAP Variabel Dependen : Penyusunan Laporan Keuangan KSU Sumber Rezeki Kota Binjai	Laporan keuangan KSU sumber Rezeki Binjai	Pendekatan penelitian dekriptif Metode Wawancara dan dokumentasi	Penyusunan laporan keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai belum sesuai dengan oenerapan pada laporan keuangan menurut SAK ETAP. Bumdes KSU Sumber Rezeki menyajikan laporan keuangan hanya berupa neraca,perhitungan hasil usaha, dan catatan atas laporan arus kas. Sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
7	(Sinaga, J.Sondakh and W.Alexander, 2016) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Atas Persediaan Pada Pt. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) Cabang Tikala Baru	Variabel Independent : SAK ETAP Variabel dependen : Persediaan Pada Pt. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) Cabang Tikala Baru	Laporan keuangan	Deskriptif komparatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAK ETAP atas Persediaan pada PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) Cabang Tikala Baru belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang SAK ETAP. Sebaiknya pihak administrasi perusahaan menampilkan kartu persediaan secara keseluruhan, melakukan penilaian persediaan, pencatatan atas barang yang masuk dan keluar dari gudang, mengungkapkan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode sehingga pengguna informasi keuangan dapat mudah mengerti serta meminimalisir kecurangan dan kerugian di PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) Cabang Tikala Baru.
8	(Rudini, Nurhayati and Afriyanto, 2016) Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin Di Desa Langkitin	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin Di Desa Langkitin	Laporan keuangan	Deskriptif kualitatif Metode Wawancara di lapangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan (jurnal) atas berbagai transaksi yang dilakukan Penggolongan transaksi pada BUMDes Langkitin belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Langkitin menggunakan jurnal memorial untuk peringkasan dan neraca percobaan untuk pengikhtisaran sehingga belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Langkitin menyajikan laporan keuangan hanya dalam dua jenis yaitu neraca dan laporan laba rugi sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
9	(Fadlol, Kartini and Kantun, 2018) Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada OryzaMart Jember Periode 2017	Variabel Independent: SAK ETAP Variabel Dependent : Analisis Laporan keuangan Pada Oryza Mart Jember Periode 2017	Laporan Keuangan Oryza Mart Jember	Deskriptif kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Oryza Mart Jember pada periode 2017 masih belum memenuhi kelengkapan menurut SAK ETAP. OryzaMart belum menyusun laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan hanya menyusun 3 laporan keuangan yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal. Ketidaksesuaian juga terdapat di dalam Neraca, yaitu belum ada klasifikasi terpisah antara peralatan toko dan peralatan kantor, gedung dan tanah. Selain itu, Oryza Mart belum memisahkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang
10	(Maryanto, 2019) Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Variabel Independent : SAK ETAP Variabel Dependent : Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pendekatan dekriptif kualitatif	Laporan keuangan yang disusun oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saleh Pisang terdiri atas Catatan Kas, Catatan Hutang, Laporan Gaji Karyawan, Laporan Laba Rugi dan Laporan Aset. Hal ini masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Didalam SAK ETAP disebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.4.2. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah peneliti (Sugiyono, 2017). Dapat dilihat dari kerangka pemikiran tersebut yang tergambar di atas, bisa di deskripsikan semacam berikut jika dari perbandingan antara teori/ peraturan yang di wakili oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dengan praktik/kenyataan yang di wakili oleh laporan keuangan BUMDes Harapan Bunder. Kemudian didapatkan suatu GAP yang nantinya hendak menuju pada kesimpulan. Setelah itu peneliti hendak membagikan anjuran dari hasil penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk menganalisis dan menguraikan hasil wawancara yang dilakukan saat lokasi lapangan. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian deskriptif kualitatif merupakan riset yang dilakukan untuk mengenali nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, ataupun menghubungkan dengan variabel yang lain. Peneliti ini dapat mendapatkan gambaran yang lengkap dari kasus yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses serta pencarian arti dibalik fenomena yang muncul dalam proses penelitian, dengan harapan agar data yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah serta apa adanya. Oleh karena itu penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berubah setelah peneliti masuk ke lapangan, sehingga penelitian dapat menghasilkan data yang akurat, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan desa.

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian kali ini merupakan BUMDes Harapan Bunder Gunung Bunder Kabupaten Bogor, pada penelitian kali ini membahas mengenai laporan keuangan.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*, yaitu sumber data dan informasi merupakan respons dari bagian dalam suatu organisasi. Dalam hal ini unit analisisnya adalah bagian organisasi yaitu dengan sumber data yang diperoleh dari BUMDes Harapan Bunder yang beralamat di Kp.Pahlawan Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Lokasi Penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa Harapan Bunder yang beralamat di Kp.Pahlawan Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akurat, penulis mengunjungi BUMDes Harapan Bunder.

3.3. Jenis dan Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data kualitatif, dan analisis dilakukan pada data non digital seperti wawancara, pencatatan laporan, atau buku. Data merupakan dasar objektif dari proses pengambilan keputusan atau kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang sama. Maka terdapat sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dari BUMDes tersebut. Menurut (Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan, 2018) adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain, seperti halnya majalah, koran, artikel, jurnal dan publikasi lainnya. Dalam penelitian tersebut membutuhkan data sekunder untuk memperoleh pengumpulan informasi perihal pihak-pihak yang terkait dan keragaman lokasi penelitian pada BUMDes Harapan Bundar.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala pengukuran
Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)	Neraca	<ul style="list-style-type: none"> Kas dan setara kas Piutang usaha Aset tetap Aset tidak berwujud Utang usaha dan utang lainnya perlengkapan 	Skala Nominal
	Laporan laba rugi	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Beban keuangan Beban pajak Laba atau rugi neto 	
	Laporan perubahan ekuitas	<ul style="list-style-type: none"> Laba rugi untuk periode Pendapatan dan beban langsung dalam ekuitas 	
	Laporan arus kas	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali 	
	Catatan atas laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut Pengungkapan lain 	

Sumber : Data diolah peneliti tahun 2021

3.5. Metode Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2017) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diperiksa, dan ketika peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pihak BUMDes yang diwawancarai.

2. Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen biasanya berupa teks pribadi, gambar atau karya monumental. Serta mempelajari buku-buku dokumen BUMDes untuk dijadikan penelitian. Adapun gunanya dokumentasi untuk mengetahui informasi tentang data-data yang akan digunakan sebagai bahan untuk penelitian.

3. Observasi

Peneliti yang mengumpulkan data secara terus terang mengatakan sumber data yang sedang dikerjakannya. Sehingga mereka mengetahui aktivitas para peneliti dari awal sampai akhir. Namun di beberapa titik peneliti tidak harus terus terang atau tersamar dalam suatu observasi, hal ini juga untuk menghindari agar data yang mereka cari tetap rahasia.

4. *Library Research* (riset kepustakaan) yaitu teknik dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui studi perpustakaan dengan cara mengumpulkan data atau dokumen lembaga maupun literature yang terkait dengan penelitian.

3.6. Metode Pengolahan / Analisis Data

Data memiliki kedudukan yang sangat penting karena mewakili variabel yang diteliti dan dapat digunakan sebagai pembuktian hipotesis. Sebagai alat yang baik data harus memenuhi dua persyaratan, yaitu efektif dan reliabel. Untuk mengungkap variabel yang diteliti, diperlukan alat ukur atau timbangan yang efektif dan andal agar kesimpulan penelitian benar dan tidak dapat memberikan gambaran yang sangat berbeda dengan keadaan sebenarnya. Validitas dan reliabilitas variabel penelitian perlu diperhatikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Dalam mencoba mencari dan mengumpulkan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data atau catatan penelitian dengan subjek yang diperlukan dari hasil observasi atau wawancara, catatan tersebut diperoleh dari lapangan dan data sekunder lainnya yang harus diperlukan.
2. Menganalisis penyusunan laporan keuangan BUMDes Harapan Bunder dengan laporan keuangan yang lengkap berdasarkan SAK ETAP, seperti; neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
3. Menganalisis laporan keuangan BUMDes Harapan Bunder apakah telah sesuai dengan SAK ETAP atau tidak.

4. Mencari tahu kendala dalam pembuatan laporan keuangan dengan cara mewawancarai pihak yang berwenang pada BUMDes tersebut.
5. Memberikan solusi dan saran yang dihadapi dalam menyelesaikan kendala-kendala di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Bundar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Harapan Bunder

1. Kondisi Geografis

Letak Desa

Desa Gunung Bunder I terletak di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Adapun batas-batas desa tersebut sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan desa Cibening Kec.Pamijahan
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tapos, Kec.Tenjolaya
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Gunung Bunder II Kec. Pamijahan
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Gunung Picung Kec. Pamijahan

2. Kondisi Demografis

- a. Jumlah penduduk Desa Gunung Bunder I sebanyak 8.818 jiwa diantaranya 4.523 jiwa laki-laki dan 4.295 jiwa perempuan.
- b. Sumber Mata Pencaharian Pokok
Sumber mata pencaharian masyarakat di Desa Gunung Bunder I yaitu meliputi : Petani, Nelayan, Buruh Pabrik, PNS, Pegawai Swasta, Polri, Bidan, Pedagang, Buruh Tani, Buruh Nelayan.

4.1.2 Sejarah dan Perkembangan Pengelolaan BUMDES Harapan Bunder

Bundes Harapan Bunder Desa Gunung Bunder I kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor di bentuk melalui forum masyarakat dan melakukan Musyawarah Desa Gunung Bunder I pada tanggal 03 September 2017.

1. Latar Belakang Pemilihan Usaha

Desa Gunung Bunder I mempunyai potensi untuk mengembangkan usahanya melalui dana yang diberikan oleh pemerintah. Akhirnya membuat BUMDes yang di berikan nama “Harapan Bunder”. Para Anggota berdiskusi usaha apa yang saat ini mudah untuk di jalankan. Salah satunya yaitu membuka usaha PPOB (*Payment Point Online Bank*) seperti melayani buka buku tabungan BNI, tarik tunai, pembayaran listrik, pulsa, tiket pesawat, angsuran motor, jasa transfer uang, pembayaran sekolah. Adapun penjualan sembako tetapi belum jalan sepenuhnya dan lebih mengutamakan usaha PPOB tersebut.

2. Perencanaan Usaha

Usaha yang didirikan merupakan jasa pembayaran secara online, hal ini tentunya memudahkan masyarakat Desa Gunung Bunder I karena masih sangat jarang usaha tersebut dikembangkan.

3. Perencanaan Pemasaran
Pemasaran ini yang di tunjukan pada warga masyarakat Desa Gunung Bunder I, sarana pendidikan, pariwisata.
4. Perencanaan Keuangan
Untuk menjalankan kegiatan usaha PPOB tersebut diperlukan dana sebagai modal awal sebesar Rp. 50.000.000 dan dana tersebut di peroleh dari APBD Provinsi Jawa Barat.

4.1.3 Kegiatan Usaha

1. Unit Usaha
Unit usaha BUMDes Harapan Bundar meliputi:
Unit Usaha PPOB atau *Payment Point Online Bank*, BUMDes Harapan Bundar banyak yang meminati dikarenakan pembayaran online yang semakin mudah dengan begitu akan memudahkan pelanggan untuk membayar listrik, pulsa, transfer uang, pembayaran BPJS dan membuka rekening baru.
2. Sumber Keuangan :
 - a. Penyertaan Modal Desa
 - b. Penyertaan modal kelompok masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan; dan/atau
 - c. Bantuan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan swasta yang diajukan untuk pembangunan Kawasan Perdesaan

4.1.4 Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi
Susunan organisasi kepengurusan Bumdes Harapan Bundar Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor meliputi dari:
 - a. Penasihat : Alamsyah
 - b. Susunan Pengurus :
 - 1) Ketua : Asep Somantri
 - 2) Sekretaris : Doni Ramdoni
 - 3) Bendahara : Aang Ansori
 - 4) Kepala Unit PPOB : Ahili Mahali
 - 5) Kepala Unit BUMDESMART (2019) : Yeni
 - Pengawas :
 - 1) Ketua : Ayatullah
 - 2) Sekretaris : Akmal Rosyidin
 - c. Anggota : Dede Irawan
2. Visi dan Misi BUMDes Harapan Bundar diantaranya:

- a. Visi
Menjadikan BUMDes Harapan Bundar sebagai lembaga usaha yang berkualitas, mampu memberikan lowongan pekerjaan untuk masyarakat Desa Gunung Bunder I, mampu melayani masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan bersama.
 - b. Misi
 - 1) Mengembangkan usaha agar dapat memberikan lowongan pekerjaan untuk masyarakat disekitar
 - 2) Meningkatkan ekonomi Desa
 - 3) Meningkatkan usaha masyarakat untuk pengelolaan potensi ekonomi Desa
3. Tujuan BUMDes Harapan Bundar adalah:
- a. Memantapkan kelembagaan perekonomian desa;
 - b. Menciptakan kesempatan berusaha;
 - c. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan;
 - d. Meningkatkan pendapatan asli desa;
 - e. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa;
 - f. Memberikan kesempatan usaha; dan
 - g. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja.

4.2 Pelaksanaan Penerapan SAK ETAP Laporan Keuangan pada BUMDes Harapan Bundar

Laporan keuangan yang telah dilakukan oleh BUMDes Harapan Bundar ialah tahapan akhir dalam siklus akuntansi sebagai pelaporan akhir. BUMDes Harapan Bundar membuat laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban atas usaha yang dijalankan BUMDes Harapan Bundar. Laporan keuangan ialah proses akuntansi yang bisa digunakan untuk sarana informasi dan komunikasi antara data keuangan dengan pihak yang bersangkutan. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi nantinya untuk hasil yang telah dicapai oleh BUMDes Harapan Bundar dalam periode tertentu sehingga melalui laporan keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penilaian oleh pihak yang bekerjasama. Maka dari itu penyusunan laporan keuangan harus di maksimalkan agar memenuhi persyaratan dalam akuntansi, secara fungsinya dan kemudahan untuk memahami isi dari laporan keuangan tersebut.

Dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar yaitu dari bendaharanya saja, maka tidaklah mengherankan laporan keuangan yang dibuat cukup sederhana, dan bendahara BUMDes pun tidak mengetahui standar apa yang cocok untuk laporan keuangan BUMDes dikarenakan kurangnya pelatihan atau kegiatan sosialisasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Selain itu juga bendahara BUMDes Harapan Bundar memiliki kesibukan lainnya seperti mengajar di Sekolah Dasar sekitaran Gunung Bunder I sehingga fokusnya terbagi.

Melalui pedoman pada SAK ETAP seharusnya laporan keuangan yang lengkap meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Sedangkan dalam laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar yang disajikan hanyalah Laporan Laba Rugi dan pembukuan terkait dengan penjualan, pengeluaran, beban-beban, semua transaksi BUMDes dicatat setiap hari di buku catatan BUMDes.

4.3 Pencatatan Laporan Keuangan BUMDes Harapan Bundar Tahun 2019

Laporan keuangan BUMDes merupakan tahap akhir dalam siklus akuntansi yaitu BUMDes Harapan Bundar salah satunya membuat laporan keuangan ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas program kerja yang selama ini dilakukan oleh BUMDes Harapan Bundar jalankan selama ini. Bumdes Harapan Bundar ini memberikan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa dan juga Pemerintah Desa atas dana yang telah diberikan kepada BUMDes Harapan Bundar tersebut. Tetapi dalam membuat laporan keuangan ini BUMDes Harapan Bundar belum menetapkan standar akuntansi untuk menyusun laporan keuangannya.

Bumdes Harapan Bundar hanya membuat laporan keuangan secara sederhana yang terdiri dari buku besar kas umum BUMDes Harapan Bundar dan laba rugi itu juga tidak mencatat semua yang seharusnya dicatat di laporan laba rugi, dimana di laporan laba rugi BUMDes Harapan ini hanya ada pendapatan, pengeluaran, belanja, beban listrik, beban gaji, dan laba. Untuk pendapatan sendiri BUMDes Harapan Bundar ini hanya mencatat pendapatan tunai, sedangkan pendapatan kreditnya tidak dicatat sebagai pendapatan, dan pendapatan tersebut tidak dijelaskan apakah hasil dari penjualan tunai atau hasil pembayaran piutang. Pembayaran utang, dan pembayaran beban lain-lain dimasukkan di akun pengeluaran, dan untuk akun belanja itu khusus untuk pembelian tunai. Selain laporan laba rugi BUMDes Harapan Bundar juga melakukan pencatatan harian yang terkait dengan penjualan, pengeluaran, beban-beban, semua transaksi BUMDes dicatat setiap hari di buku besar kas umum BUMDes.

Yang menyusun laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar hanya satu orang yaitu bendahara BUMDes, tidak aneh jika laporan keuangan yang dibuatnya cukup sederhana, dan bendahara BUMDes Harapan Bundar pun tidak mengetahui standar apa yang cocok untuk laporan keuangan BUMDes karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan juga tidak adanya pendampingan dan pengawasan dari pihak terkait mengenai kegiatan dalam menyusun laporan keuangan BUMDes.

Jika berpedoman pada SAK ETAP seharusnya laporan keuangan yang lengkap meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Sedangkan dalam laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar yang disajikan hanya Laporan Laba Rugi dan catatan-catatan harian baik dari pendapatan maupun pengeluaran.

Per 31 Des 2019
(Dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Operasional		
1.1.1	Unit Usaha PPOB	120.000	
1.1.2	Unit Usaha	500.000	
1.1.3	Pendapatan Operasional Lain-Lain	0	
1.2	Pendapatan Non Operasional		
1.2.1	Bunga Bank BUM Desa	0	
1.2.2		0	
1.2.3		0	
1.2.4		0	
	TOTAL PENDAPATAN		620.000
2	BIAYA		
2.1	Unit Usaha		
2.1.1	Unit Usaha	0	
2.1.2	Unit Usaha Lainnya	0	
			0
2.2	Biaya Operasional:		
2.2.1	Insentif Pengurus BUM Desa	0	
2.2.2	ATK/Administrasi Umum	500.000	
2.2.3	Transportasi	0	
2.2.4	Biaya Operasional lain-lain	0	
2.2.5	Penyusutan	162.500	
			662.500
2.3	Biaya Non Operasional:		
2.3.1	Pajak Bank Rekening BUM Desa	0	
2.3.2	Adm Bank Rekening BUM Desa	0	
2.3.3	Biaya Non Operasional Lain-lain	0	
			0
	TOTAL BIAYA		662.500
	LABA / (RUGI)		-42.500

Sumber: Dokumentasi laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar (2019)

BUMDes Harapan Bundar membuat laporan laba rugi tetapi didalamnya hanya terdapat pendapatan, beban alat tulis kantor, dan biaya penyusutan. Pendapatan BUMDes Harapan Bundar ini hanya mencatat pendapatan berupa kas saja tetapi piutang tidak di catat, pengeluaran pun didalamnya hanya mencatat pembelian alat tulis kantor. Oleh karena itu laporan laba rugi yang dibuat oleh BUMDes Harapan Bundar belum sesuai dengan SAK ETAP baik dari susunannya maupun pencatatan akun yang seharusnya dicatat di akun yang semestinya.

4.4 Analisis Laporan Keuangan BUMDes Harapan Bundar dengan SAK ETAP

4.4.1 Pengakuan Akun Neraca BUMDes Harapan Bundar

1. Aset Lancar

a. Kas

SAK ETAP paragraf 7.1 menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Paragraf 7.2 setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Paragraf 7.16 entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca.

Kas di BUMDes Harapan Bundar ialah sejumlah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional BUMDes dan dari kas tersebut merupakan hasil dari pendapatan penjualan. Transaksi yang dilakukan oleh BUMDes Harapan Bundar di catat dengan menggunakan pencatatan sederhana di buku catatan toko yang di rekap oleh bendahara BUMDes Harapan Bundar. BUMDes Harapan Bundar belum membuat neraca pada laporan keuangannya dan belum melakukan pencatatan kas pada buku catatan kas, di mana kas tersebut hanya di catat dalam buku catatan BUMDes. Pengakuan kas dan setara kas menurut SAK ETAP harus diakui dalam neraca, sehingga pengakuan kas dan setara kas pada BUMDes Harapan Bundar belum sesuai dengan SAK ETAP.

b. Persediaan

BUMDes Harapan Bundar belum mengakui persediaan pada laporan keuangannya, dikarenakan pengurus BUMDes tidak melakukan perhitungan fisik setiap akhir bulan maupun akhir tahun terhadap jasa pelayanannya, dikarenakan usaha ini hanya melakukan transaksi pembayaran seperti listrik, pulsa, pembayaran sekolah, BPJS dan tranfer antar bank.

SAK ETAP paragraf 11.3 entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. BUMDes Harapan Bundar tidak mempunyai persediaan untuk kebutuhan toko dikarenakan usahanya hanya jasa tranfer online. BUMDes Harapan Bundar tidak membuat neraca sehingga belum sesuai dengan SAK ETAP.

2. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap dari BUMDes Harapan Bundar dengan cara mencatat semua aset tetap pada catatan buku BUMDes, aset tetap pada SAK ETAP paragraf 15.4 diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya pada masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tetap tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah

terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Pengakuan aset tetap yang dilakukan BUMDes Harapan Bundar belum sesuai dengan SAK ETAP karena BUMDes Harapan Bundar belum menyusun neraca.

3. Kewajiban

Pengakuan kewajiban menurut SAK ETAP paragraf 2.35 diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Pencatatan hutang yang dilakukan BUMDes Harapan Bundar dengan mencatat hutang pada buku catatan buku BUMDes. Sehingga Pengakuan hutang dari BUMDes Harapan Bundar ini belum sesuai dengan SAK ETAP karena BUMDes Harapan Bundar belum menyusun neraca.

4. Ekuitas

Menurut SAK ETAP pragraf 19.25 Modal dasar, modal yang ditempatkan, modal yang disetor, nilai nominalnya dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham dinyatakan dalam neraca. Modal BUMDes Harapan Bundar berasal dari pemerintah desa yang seharusnya dicatat dalam neraca namun dalam pelaksanaannya belum mencatat dan belum membuat neraca. BUMDes Harapan Bundar harus mencatat modal yang di terima maupun yang dikeluarkan karena modal digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu tugas pekerjaan.

Tabel 4.2
Perbandingan Pengakuan Neraca
BUMDes Harapan Bundar dengan ketentuan SAK ETAP

SAK ETAP	BUMDes Harapan Bundar	Kriteria
Paragraf 7.16 entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca	BUMDes Harapan Bundar belum membuat neraca pada laporan keuangannya dan belum melakukan pencatatan kas pada buku catatan kas. Dimana kas tersebut hanya dicatat pada buku catatan BUMDes.	Belum Sesuai
SAK ETAP paragraf 11.3 entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual.	BUMDes Harapan Bundar tidak memiliki persediaan untuk barang di tokonya karena usahanya hanya jasa transfer online. BUMDes Harapan Bundar tidak membuat neraca.	Belum Sesuai
Pada SAK ETAP paragraf 15.4 tentang aset tetap. aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. pengakuan aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan.	Pengakuan aset tetap dari BUMDes Harapan Bundar, dengan cara mencatat semua aset tetap pada buku catatan BUMDes di karenakan belum menyusun neraca.	Belum Sesuai
Paragraf 2.35 pengakuan kewajiban menurut SAK ETAP diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya	Pengakuan kewajiban BUMDes Harapan Bundar belum sesuai dengan SAK ETAP karena belum mencatat dan belum	Belum Sesuai

yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.	membuat catatan hutang dan belum membuat neraca, Seharusnya BUMDes Harapan Bundar mengakui kewajiban atas transaksi selama periode berjalan yang jumlahnya harus diselesaikan.	
Menurut SAK ETAP paragraf 19.23 modal dasar, modal yang ditempatkan, modal yang disetor, nilai nominalnya dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham dinyatakan dalam neraca	Modal BUMDes Harapan Bundar berasal dari Pemerintah Desa dan dicatat di laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar tetapi tidak dicatat di neraca karena belum menyusun neraca.	Belum Sesuai

Sumber: Diolah penulis (2021)

4.4.2 Pengukuran Akun Neraca BUMDes Harapan Bundar

4.4.2.1 Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

Dalam proses pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kas dan setara kas dalam laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar berdasarkan pencatatan nominal dari akun-akun yang tersedia pada laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar dengan catatan sebesar harga perolehan.

Menurut SAK ETAP paragraf 2.31 dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar. biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Sehingga pengukuran kas BUMDes Harapan Bundar sudah sesuai dengan SAK ETAP.

2. Persediaan

BUMDes Harapan Bundar tidak mengukur persediaan karena tidak membuat laporan keuangannya. SAK ETAP paragraf 11.3 menyatakan entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. BUMDes Harapan Bundar tidak menyimpan persediaan, karena BUMDes hanya menyediakan jasa untuk melayani pembayaran online seperti listrik, pulsa, BPJS, transfer antar bank, pembayaran sekolah. Sehingga BUMDes Harapan Bundar tidak memiliki persediaan, hanya mengitung nilai penjualan dari perkiraan saja belum menghitung secara detail dan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.

3. Kewajiban

SAK ETAP pada paragraf 2.31 sudah dijelaskan bahwasanya kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Pengukuran pada kewajiban tidak dilakukan oleh BUMDes Harapan Bundar. Seharusnya BUMDes Harapan Bundar mengukur kewajiban dicatat

sesuai dengan aset yang diterima. Sehingga pengukuran kewajiban BUMDes Harapan Bundar tidak sesuai dengan SAK ETAP.

4. Ekuitas

SAK ETAP pada paragraf 2.19 ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mungkin di sub klasifikasikan dalam neraca. Misalnya, entitas yang berbentuk perseroan terbatas, subklasifikasi dapat meliputi dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo laba dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas. BUMDes Harapan Bundar mencatat modal awal pada laporan keuangannya, tetapi tidak melakukan pengukuran terhadap modal yang sudah digunakannya dan belum diketahui berapa modal setelah dikurangi oleh semua kewajiban. Sehingga pengukuran ekuitas ini belum sesuai dengan SAK ETAP.

Tabel 4.3

Perbandingan Pengukuran Neraca BUMDes Harapan Bundar dengan ketentuan SAK ETAP

SAK ETAP	BUMDes Harapan Bundar	Kriteria
Menurut SAK ETAP paragraf 2.31 dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar.	Pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kas dan setara kas dalam laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar belum mencatat berdasarkan pencatatan nominal dari akun-akun yang tersedia pada laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar dengan dicatat sebesar harga perolehan.	Belum sesuai
Paragraf 11.3 menyatakan entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual.	BUMDes Harapan Bundar tidak mengukur akun persediaan yang dilakukan berdasarkan harga perolehan pada saat pembelian barang dagangan, Karena BUMDes hanya menyediakan jasa untuk melakukan pembayaran online.	Belum sesuai
Paragraf 15.6 dijelaskan bahwa saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur berdasarkan harga perolehan	BUMDes Harapan Bundar tidak melakukan pengukuran pada akun aset tetap BUMDes Harapan Bundar tidak melakukan pengukuran pada akun aset tetap karena tidak membuat neraca, seharusnya mengukur aset tetap berdasarkan harga perolehan	Belum Sesuai
Paragraf 2.31 kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.	Pengukuran pada akun hutang tidak dilakukan oleh BUMDes Harapan Bundar. Seharusnya BUMDes Harapan Bundar mengukur kewajiban dicatat sesuai dengan aset yang diterima.	Belum Sesuai
Paragraf 2.19 ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mungkin disubklasifikasikan dalam neraca.	BUMDes Harapan Bundar tidak mengukur modal. Dalam pelaksanaannya modal dari BUMDes Harapan Bundar berasal dari Pemerintah Desa. Dan seharusnya mengukur besarnya modal yang diterima dikurangi dengan kewajiban	Belum Sesuai

Sumber: diolah penulis (2021)

4.4.3 Pengakuan Akun Laporan Laba Rugi BUMDes Harapan Bundar

1. Pendapatan

BUMDes Harapan Bundar mengakui pendapatan dari transaksi penjualan selama periode berjalan. Dalam SAK ETAP 2.36 Pengakuan pendapatan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

2. Beban

Pengukuran beban BUMDes Harapan Bundar diukur dari berapa besar kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk akun beban. Dengan kata lain diukur berdasarkan nilai wajar dari pengeluaran yang dikeluarkan dari BUMDes Harapan Bundar. Hal ini sesuai dengan definisi penyajian wajar menurut SAK ETAP yaitu penyajian yang jujur dari pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk aset, kewajiban, dan beban. Beban pada BUMDes Harapan Bundar antara lain beban gaji, beban listrik, beban sewa, beban penyusutan, dan beban lain-lain. beban diakui di laporan laba rugi dan diukur berdasarkan nilai wajar.

Tabel 4.4
Perbandingan Pengakuan Akun Laporan Laba Rugi
BUMDes Harapan Bundar dengan ketentuan SAK ETAP

SAK ETAP	BUMDes Harapan Bundar	Kriteria
Dalam SAK ETAP 2.36 Pengakuan pendapatan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.	BUMDes Harapan Bundar mengakui pendapatan dari transaksi penjualan selama periode berjalan	Sesuai
Paragraf 2.37 pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.	BUMDes Harapan Bundar mencatat beban pada laporan laba rugi sehingga beban akan mengurangi pendapatan yang diterima dan beban juga dapat diukur secara andal.	Sesuai

Sumber : diolah penulis (2021)

4.4.4 Pengukuran Akun Laporan Laba Rugi BUMDes Harapan Bundar

1. Pendapatan

Pengukuran pendapatan BUMDes Harapan Bundar dengan cara menghitung jumlah pendapatan yang didapatkan dari hasil penjualan. Dari aktivitas penjualan tersebut akan didapat sejumlah pendapatan yang akan diakui sebagai pendapatan BUMDes. Dalam SAK ETAP paragraf 20.3 Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. BUMDes Harapan Bundar sudah mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar dengan mengukur pendapatan atas pembayaran dari penjualan yang diterima.

2. Beban

Pengukuran beban BUMDes Harapan Bundar diukur dari berapa besar kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk akun beban. Dengan kata lain diukur berdasarkan nilai wajar dari pengeluaran yang dikeluarkan dari BUMDes Harapan Bundar. Hal ini sesuai dengan definisi penyajian wajar menurut SAK ETAP yaitu penyajian yang jujur dari pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk aset, kewajiban, dan beban. Beban pada BUMDes Harapan Bundar antara lain beban gaji, beban listrik, beban sewa, beban penyusutan, dan beban lain-lain. beban diakui di laporan laba rugi dan diukur berdasarkan nilai wajar.

Tabel 4.5

Perbandingan Pengukuran BUMDes Harapan Bundar dengan ketentuan SAK ETAP

SAK ETAP	BUMDes Harapan Bundar	Kriteria
Paragraf 20.3 entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.	Pengukuran pendapatan BUMDes Harapan Bundar ini berdasarkan nilai wajar dari jumlah kas hasil penjualan, tanpa memasukan potongan volume maupun jumlah diskon penjualan.	Sesuai
Penyajian wajar menurut SAK ETAP yaitu penyajian yang jujur dari pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk aset, kewajiban, dan beban. Beban diakui di laporan laba rugi dan diukur berdasarkan nilai wajar.	Pengukuran beban BUMDes Harapan Bundar adalah diukur dari berapa besar kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk akun beban. Dengan kata lain diukur berdasarkan nilai wajar dari pengeluaran yang dikeluarkan dari BUMDes Harapan Bundar.	Sesuai

Sumber: diolah penulis (2021)

4.4.5. Laporan Perubahan Ekuitas

SAK ETAP Paragraf 6.3 Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

1. Laba atau rugi untuk periode
2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
3. Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

BUMDes Harapan Bundar belum membuat laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangannya maka tidak sesuai dengan SAK ETAP. Seharusnya setelah membuat laporan laba rugi BUMDes Harapan Bundar membuat laporan perubahan ekuitas yang menyajikan sesuai dengan SAK ETAP.

4.4.6. Laporan Arus Kas

SAK ETAP paragraf 7.1 mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya laporan arus kas menyajikan informasi perubahan

historis atau kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. SAK ETAP mengajurkan laporan arus kas dibuat dengan metode tidak langsung. BUMDes Harapan Bundar belum membuat laporan arus kas dalam laporan keuangannya karena ketidaktahuan akan membuat laporan arus kas, sehingga laporan arus kas tidak sesuai dengan SAK ETAP.

4.4.7. Catatan Atas Laporan Keuangan

BUMDes Harapan Bundar tidak menjelaskan laporan keuangan (CALK) saat menyusun laporan keuangannya. Karena kurangnya pemahaman atas komponen laporan keuangan yang lengkap dan laporan keuangan yang telah disusun sebelumnya, maka yang ada hanya laporan laba rugi, yang didasarkan pada keterbatasan pengetahuan pemilik dan pegawai BUMDes Harapan Bundar.

Dalam SAK ETAP paragraf 8.2 Catatan atas laporan keuangan harus:

1. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.
2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
3. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

4.4.8. Kendala yang dihadapi oleh BUMDes Harapan Bundar Dalam Penerapan SAK ETAP

Penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan BUMDes Harapan Bundar belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini dikarekan adanya faktor penghambat yang menyebabkan sulitnya penerapan SAK ETAP tersebut. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menganalisis ada beberapa hal yang menghambat penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan BUMDes Harapan Bundar yaitu :

1. Masih rendahnya pemahaman seluruh petugas BUMDes perihal SAK ETAP
2. Tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar.
3. Kurang diadakannya sosialisasi kepada BUMDes terkait Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP oleh Pemerintah ataupun Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) selaku pencetus standar ini.
4. Belum ada pendampingan intensif yang terkait mengenai penerapan SAK ETAP.

4.4.9. Penyajian Laporan Keuangan BUMDes Harapan Bundar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian yang jujur atas dampak transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan standar pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Pengakuan data dari

BUMDes Harapan Bundar meliputi bukti transaksi dan laporan laba rugi, namun tidak menggunakan standar dalam penyusunan laporan keuangan yang benar dalam penyusunan laporan laba rugi. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

4.4.9.1. Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019

1. Penyajian Neraca Tahun 2019

BUMdes Harapan Bundar belum menyusun laporan neraca dengan baik pada laporan keuangannya, karena kurangnya pengetahuan dan informasi dari BUMDes serta tidak adanya pendamping dari pihak yang terkait agar pengurus BUMDes dapat menyusun neraca sesuai dengan SAK ETAP. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan Neraca yang sesuai dengan SAK ETAP dengan metode *Accrual Basis*, yang datanya didapatkan langsung dari BUMDes Harapan Bundar.

Tabel 4.6
Laporan Neraca BUMDes Harapan Bundar 2019
BUMDES HARAPAN BUNDAR
NERACA
Per 31 Des 2019
(Dalam Satuan Rupiah)

ASET		LIABILITAS DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		LIABILITAS	
Kas	943.345	-	
Kas di Bank	132.144.403		
Piutang Usaha	1.100.000		
Perlengkapan	569.500		
Total Aset Lancar	134.757.248	EKUITAS	
		Modal Desa	237.124.998
ASET TETAP		TOTAL EKUITAS	237.124.998
Peralatan Listrik	130.500		
Akumulasi Penyusutan Peralatan Listrik	(4.400)		
Peralatan Printer	1.300.000		
Akumulasi Penyusutan Peralatan Printer	(238.700)		
Pintu dan Kusen	27.181.500		
Akumulasi Penyusutan Pintu dan Kusen	(1.415.750)		
AC	5.022.000		
Akumulasi Penyusutan AC	(523.000)		
Rak	62.800.000		
Akumulasi Penyusunan Rak	(419.400)		
Meja	7.100.000		
Akumulasi Penyusutan Meja	(74.000)		
Wifi	1.525.000		
Akumulasi Penyusutan Wifi	(16.000)		
Total Aset Tetap	102.367.750		
TOTAL ASET	237.124.998	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	237.124.998

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

2. Penyajian Laporan Laba Rugi Tahun 2019

BUMDes Harapan Bundar sudah menyusun laporan laba rugi tetapi masih belum sesuai dengan SAK ETAP karena tidak membuat rincian beban-beban, serta membuat harga pokok penjualan. Sehingga penulis merekomendasikan laporan laba rugi dan yang sesuai dengan SAK ETAP.

Tabel 4.7 Laporan Laba Rugi Tahun 2019

BUMDes Harapan Bundar Laporan Laba Rugi 31 Des 2019 (Dalam Satuan Rupiah)	
Pendapatan:	
Pendapatan Operasional :	
Pendapatan Penjualan Pulsa	4.633.757
Pendapatan Penjualan Listrik	81.120
Pendapatan Pembuatan Rekening	230.000
Pendapatan Transfer Bank	2.546.690
Pendapatan BPJS	
Pendapatan atas Cicilan	77.100
Pendapatan UTBK	11.000
Pendapatan Non operasional :	7.500
Pendapatan Jasa Giro	568.100
TOTAL PENDAPATAN	8.155.267
Beban:	
HPP Pulsa	4.271.341
Beban Makan - Minum	817.000
Beban Transport	1.481.500
Beban Lain-Lain	1.660.000
Beban Air	4.000
Beban Penyusutan Printer	238.700
Beban Penyusutan Peralatan Listrik	4.400
Beban Gaji	2.100.000
Beban Penyusutan Pintu dan Kusen	1.415.750
Beban Penyusutan AC	523.000
Beban Penyusutan Rak	419.400
Beban Penyusutan Meja	74.000
Beban Penyusutan Wifi	16.000
TOTAL BEBAN	(13.025.091)
LABA USAHA SEBELUM PAJAK	(4.869.824)
PPH	- 170.002
TOTAL LABA BERSIH	(5.039.826)

Sumber: Data diolah penulis (2021)

3. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019

BUMDes Harapan Bundar tidak ada penyusunan laporan perubahan ekuitas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai fungsi dari laporan perubahan ekuitas itu sendiri dan kurang mengerti bagaimana membuat laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, Peneliti akan merekomendasikan laporan perubahan ekuitas berdasarkan SAK ETAP yang berlaku.

Tabel 4.8
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019
BUMDES HARAPAN BUNDAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 Des 2019
(Dalam Satuan Rupiah)

Modal Awal		42.164.824
Penambahan Modal		200.000.000
Laba/Rugi	(5.039.826)	
Modal Akhir 2019		237.124.998

Sumber: Data diolah penulis (2021)

4. Penyajian Laporan Arus Kas
SAK ETAP menganjurkan laporan arus kas dibuat dengan metode tidak langsung. Dikarenakan BUMDes Harapan Bundar tidak membuat Laporan Arus Kas, maka penulis merekomendasikan BUMDes Harapan Bundar untuk membuat Laporan Arus Kas berdasarkan SAK ETAP sebagai berikut:

Tabel 4.9
Laporan Arus Kas
BUMDES HARAPAN BUNDAR
LAPORAN ARUS KAS
31 Des 2019
(Dalam Satuan Rupiah)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Bersih		(5.039.826)
Penyesuaian Untuk :		
Beban Penyusutan	4.791.250	
Kenaikan perlengkapan	(569.500)	
kenaikan Piutang	(1.100.000)	
Kas Bersih yang di peroleh dari Aktivitas Operasi		(1.918.076)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian peralatan	1.430.500	
Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi		1.430.500
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penambahan Modal	200.000.000	
Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		200.000.000
Kenaikan Bersih dalam Kas dan Setara Kas		199.511.794
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode		40.258.266
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode		134.757.248

Sumber: Data diolah penulis (2021)

5. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019

BUMDes Harapan Bundar belum menyusun catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangannya. Catatan atas laporan keuangan memberikan rincian dari pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Agar nantinya laporan keuangan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan kepemilik perusahaan. Oleh karena itu penulis merekomendasikan catatan atas laporan keuangan sebagai berikut berdasarkan suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah di susun sesuai dengan SAK ETAP yang meliputi ringkasan kebijakan akuntansi pada BUMDes Harapan Bundar. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan sebagai informasi tambahan yang tidak dapat diungkapkan melalui angka-angka dan untuk memahami informasi laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar secara komprehensif dan baik.

Tabel 5.0

Catatan Atas Laporan Keuangan BUMDes 2019 Harapan Bundar

BUMDES BUMDES HARAPAN BUNDAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019	
1.	UMUM
a.	Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
	Bumdes Harapan Bundar Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dibentuk pada Tanggal 03 September 2017. Desa Gunung Bunder I sendiri memiliki potensi untuk mengembangkan suatu usaha, salah satu yang mendorong usaha tersebut melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan.
	Bumdes Harapan Bundar diketuai oleh Asep Somantri Sekretaris Doni Ramadoni, Bendahara Aang Ansori, Kepala Unit Usaha PPOB Ahili maali. Serta 4 Orang pengawas yaitu Ayatullah, Akmal Rosyidin, Dede Irawan.
	Visi dan Misi Bumdes Harapan Bundar Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
a.	Visi
	Menjadikan BUMDes Harapan Bundar sebagai lembaga usaha yang berkualitas, mampu memberikan lowongan pekerjaan untuk masyarakat Desa Gunung Bunder I, mampu melayani masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan bersama.
b.	Misi
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan usaha agar dapat memberikan lowongan pekerjaan untuk masyarakat disekitar • Meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan untuk ekonomi Desa • Meningkatkan usaha masyarakat untuk pengelolaan potensi ekonomi Desa
2.	Kebijakan Akuntansi
a.	Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
	Laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus dan CALK. Laporan keuangan disusun berdasarkan accrual basis sehingga pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi. Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (Rp).
a.	Kas
	Kas terdiri dari Kas di mana kas berasal dari bendahara desa yang di atur oleh pemerintahan desa dalam penggunaannya untuk memenuhi biaya operasional sehari-hari, seperti pembelian perlengkapan, peralatan dan beban operasional lainnya.
b.	Piutang
	Piutang BUMDes “Harapan Bundar” ini sendiri dari rekening saldo BJB. Entitas pada dasarnya mengadakan penyisihan untuk kemungkinan adanya piutang yang tidak dapat tertagih berdasarkan persentase atas saldo piutang pada neraca.
c.	Aset Tetap dan Berwujud

SAK ETAP menjelaskan bahwa beban perolehan aset tetap harus setara harga tunainya pada tanggal pengakuan dan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap. Nilai aset tetap diakui sebesar harga perolehan yang dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak bisa disusutkan. Harga perolehan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap. Akumulasi dihitung berdasarkan masa manfaat dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

d. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima. Beban dicatat pada saat terjadinya transaksi.

e. Ekuitas

Ekuitas merupakan modal yang digunakan oleh pemilik untuk membangun entitas. Pembangunan BUMDes "Harapan Bundar" berdasarkan modal yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan produktivitas ekonomi pedesaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan SAK ETAP dalam laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang di susun oleh BUMDes Harapan Bundar terdiri atas Laporan Laba Rugi dan Buku catatan BUMDes saja. Hal ini tentunya masih belum sesuai dengan SAK ETAP. Dalam SAK ETAP di sebutkan pada paragraf 3.12 disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dan pengakuan, pengukuran, penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dengan benar. Sedangkan BUMDes Harapan Bundar masih menggunakan *Cash Basis* sedangkan menurut SAK ETAP harus menggunakan *Accrual Basis*.
2. BUMDes Harapan Bundar dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dengan benar.
3. Terdapat kendala-kendala dari BUMDes Harapan Bundar dalam menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya adalah sebagai berikut :
 - a. Masih rendahnya pemahaman seluruh petugah BUMDes perihal SAK ETAP
 - b. Tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar.
 - c. Kurang diadakannya sosialisasi kepada BUMDes terkait Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP oleh Pemerintah ataupun Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) selaku pencetus standar ini.
 - d. Belum ada pendampingan intensif yang terkait mengenai penerapan SAK ETAP.
 - e. Terjadinya multitasking dalam pengerjaan tugas yang di alami oleh Bendahara BUMDes yang sekaligus mempunyai peran sebagai guru di Desa Gunung Bunder I dalam hal administrasi dan keuangan sehingga data-data transaksi berantakan karena tidak di tata dengan rapi.
 - f. Kurangnya pengawasan dari pihak berkepentingan seperti pemerintah desa yang seharusnya mengawasi terhadap laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar karena anggaran yang di keluarkan dari anggaran desa dan harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan di BUMDes.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran dalam upaya pembenahan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes Harapan Bundar.

1. Saran Praktis

- a. BUMDes wajib melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan SAK ETAP agar dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan.
- b. BUMDes sebaiknya mempekerjakan pegawai di bidang akuntansi sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan dan membuat sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini.
- c. Tersedianya sosialisasi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku pencetus pedoman SAK ETAP.
- d. Adanya pengawan dari pemerintah untuk mempertanggung jawabkan hasil usaha BUMDes selama tahun berjalan.

2. Saran Akademis

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang terdapat pada penelitian sebelumnya sehingga penelitian selanjutnya bisa lebih baik lagi.

- a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan objek berbeda dari penelitian sebelumnya sehingga dapat merekomendasikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP pada BUMDes yang lain.
- b. Keterbatasan penelitian ini yaitu kekurangan data-data yang akurat dalam bukti- bukti transaksi, karena pihak BUMDes dalam bagian administrasi dan keuangannya tidak tertata. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat mengurangi kekurangan dan kelemahan peneliti ini sehingga peneliti selanjutnya diharapkan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarudin, A. (2019) *Laporan keuangan BUMDes harus berbasis SAK ETAP, AntaraJabar*. Available at: <https://jabar.antaranews.com/berita/103924/laporan-keuangan-bumdes-harus-berbasis-saketap> (Accessed: 20 March 2021).
- Andriani, L., Atmadja, A. T. and Sinarwati, N. K. (2014) 'Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Peggy Salon', *e-Journal SI Ak. Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), pp. 1–12. Available at: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2254>.
- Baru Dua Bumdes Maju, Bupati Bogor: Maksimalkan* (2019) *InilahKoran*. Available at: <https://www.inilahkoran.com/berita/9260/baru-dua-bumdes-maju-bupati-bogor-maksimalkan> (Accessed: 20 March 2019).
- diskominfo (2019) *Ade Yasin: 334 BUM Des di Kabupaten Bogor Sudah Terbentuk, portal resmi kabupaten bogor*. Available at: <https://bogorkab.go.id/post/detail/ade-yasin-334-bum-des-di-kabupaten-bogor-sudah-terbentuk> (Accessed: 19 March 2021).
- Fadlol, M. A., Kartini, T. and Kantun, S. (2018) 'Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Oryza Mart Jember Periode 2017', *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 12(2), pp. 1–7. doi: 10.19184/jpe.v12i2.8570.
- Hery (2018) *Analisis Laporan Keuangan*. Edited by Adipramono. Jakarta: Jakarta : Grasindo, 2018 © Penerbit PT Grasindo. Available at: https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Laporan_keuangan/gIFJDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Ibrahim (2018) *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*. pertama. Edited by Masruroh. Yogyakarta: LeutikaPrio. doi: 6023715745.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2015) *Standar Akuntansi keuangan per efektif tahun 2015*. per efektif. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2020) *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. cetakan ke 8. Edited by Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta: graha akuntan sindanglaya.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2018) *Standar Akuntansi Keuangan Efektif per 1 Januari 2018*. cetakan pe. Edited by Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta: graha akuntan sindanglaya.
- Kasmir (2018) *Analisis Laporan Keuangan*. cetakan ke. Edited by S. Rinaldy. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Laporan Keuangan BUMDesa* (2020) *Kemenkeu Learning Center*. Available at: <https://klc.kemenkeu.go.id/pusknpk-laporan-keuangan-bumdesa/>.

- Lintong, J. S., Limpeleh, E. A. N. and Sungkowo, B. (2020) ‘Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes “Kineauan” Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan’, *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 16(1), pp. 95–101. doi: 10.31940/jbk.v16i1.1597.
- Maryanto (2019) ‘Analisis Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh)’, *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)*, 8(1), pp. 1–15. doi: 10.36272/jes.v8i1.189.
- Munawir (2014) *Analisis Laporan Keuangan*. cetakan ke. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Norkamsiah, Kesuma, A. I. and Setiawaty, A. (2016) ‘Penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap) pada penyusunan laporan keuangan’, *Akuntabel (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 13(2), pp. 1–13. Available at: <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/1181>.
- Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan, A. U. (2018) *Metodelogi penelitian bisnis*. pertama. Edited by H. N. Utami. malang: UPT.percetakan dan penerbitan. Available at: [https://books.google.co.id/books?id=dSJyDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metode+penelitian+bisnis&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi-cyz5ZbvAhXYX30KHSi6B-EQ6AEwAHoECAyQAg#v=onepage&q=metode penelitian bisnis&f=false](https://books.google.co.id/books?id=dSJyDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metode+penelitian+bisnis&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi-cyz5ZbvAhXYX30KHSi6B-EQ6AEwAHoECAyQAg#v=onepage&q=metode%20penelitian%20bisnis&f=false).
- Ponomban, Yohanes. C. Saerang, David P.E. Wangkar, A. (2016) ‘Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada CV. Bahu Bahtera Indah Manado. *Analysis Of The Implementation Of Financial Statements Based On The SAK ETAP CV.Bahu Bahtera Indah Manado*’.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Perusaha’, 4(3), pp. 622–630.
- Ridlwan, Z. (2015) ‘Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa’, *Flat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), pp. 424–440. doi: 10.25041/fiatjustisia.v8no3.314.
- Rini, F. L. E. (2015) ‘Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP (Studi pada UMKM Ekspedisi CV. Mandiri) Periode Tahun 2014’, *KIAFE*, Vol 4, No. Available at: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/11530>.
- Rudini, Nurhayati and Afriyanto (2016) ‘Analisis Penerapan SAK ETAP pada Bdan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin di Desa Lnagkitin.’, *e-Journal Universitas pasir pengaraian*, 3(2), pp. 1–6.
- Septiana, A. (2019) *Anlisis Laporan Keuangan*. cetakan pe. Edited by R. Hermawan. Jawa Timur: Duta Media Publishing. doi: 6026546987.
- Sinaga, R. C., J.Sondakh, J. and W.Alexander, S. (2016) ‘ISSN 2303-1174 R.C. Sinaga., J.J. Sondakh., S.W. Alexander Analisis Penerapan SAK ETAP’, *Jurnal EMBA*, 4(4), pp. 1–10.

- Singal, Ribka Agustine. Pinatik, S. (2015) 'Evaluasi Penyusunan Laporan Laba Rugi dan Neraca Berdasarkan SAK ETAP Pada PT.Karunia Multiguna Abadi', 3(4), pp. 395–403.
- Sugiono, A. and Untung, E. (2016) *Analisis Laporan Keuangan*. Edited by Adipramono. Jakarta: PT grasindo. Available at: https://www.google.co.id/books/edition/Panduan_Praktis_Dasar_Analisa_Keuangan_E/2FFJDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ke-19. Bandung: Cv.Alfabeta.
- 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.11 Tentang Badan Usaha Milik Desa' (2021).
- Widiyastuti, P. (2017) 'Pencatatan laporan keuangan berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap) pada usaha mikro kecil menengah (umkm) di bidang jasa', *Journal for Business and Entrepreneur*, 1 No.1(1), pp. 125–133. doi: 25016682.
- Zainal (2019) 'Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai', *JIME (Journal of Industrial and Manufacture Engineering)*, 3(November), pp. 1–9.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Restiany Febria Darussalam
Alamat : Cipayung Pondok Rajeg no.18 RT.02 RW.06
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor,09 Febuari 1999
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN Cipayung 01
- SMP : SMPN 02 Cibinong
- SMA : SMAN 03 Cibinong
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2021
Peneliti,

(Restiany Febria Darussalam)

LAPORAN LABA RUGI
BUMDESA HARAPAN BUNJAR DESA GUNUNG BUNDER I
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR
JANUARI 2019

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Operasional		
1.1.1	Unit Usaha PPOB	120.000	
1.1.2	Unit Usaha	500.000	
1.1.3	Pendapatan Operasional Lain-Lain	0	
1.2	Pendapatan Non Operasional		
1.2.1	Bunga Bank BUM Desa	0	
1.2.2		0	
1.2.3		0	
1.2.4		0	
	TOTAL PENDAPATAN		620.000
2	BIAYA		
2.1	Unit Usaha		
2.1.1	Unit Usaha	0	
2.1.2	Unit Usaha Lainnya	0	
			0
2.2	Biaya Operasional:		
2.2.1	Insentif Pengurus BUM Desa	0	
2.2.2	ATK/Administrasi Umum	500.000	
2.2.3	Transportasi	0	
2.2.4	Biaya Operasional lain-lain	0	
2.2.5	Penyusutan	162.500	
			662.500
2.3	Biaya Non Operasional:		
2.3.1	Pajak Bank Rekening BUM Desa	0	
2.3.2	Adm Bank Rekening BUM Desa	0	
2.3.3	Biaya Non Operasional Lain-lain	0	
			0
	TOTAL BIAYA		662.500
	LABA / (RUGI)		-42.500

Dokumentasi



Hasil Wawancara

1. Bagaimana awal di dirikannya BUMDes Harapan bundar di buat?
Jawaban: “BUMDes Harapan Bundar dibentuk dengan harapan agar bisa mensejahterakan masyarakat, lalu dengan musyawarah bersama untuk membentuk BUMDes pada tahun 2017. Tetapi mulai berjalan pada tahun 2018 dan mulai menjalankan program pada bulan September. Kita melihat dulu program BUMDes apa yang cocok untuk di desa Gunung Bunder ini dan yang cocok yaitu usaha PPOB (*payment Point Online Bank*) Kemudian terpilih lah susunan organisasi tersebut.”
2. Bagaimana sistem pencatatan laporan keuangan BUMDes Harapan Bundar dari awal pendirian berlangsung?
Jawaban: “untuk pencatatan laporan keuangannya kita melakukannya dengan manual, dengan mencatat transaksi menggunakan buku besar BUMdes Harapan Bundar.
3. Modal awal BUMDes Harapan Bundar darimana ?
Jawaban: “Untuk modal itu sendiri kita mendapatkan dari pemerintah desa”
4. Apakah di BUMDes Harapan Bundar terdapat struktur organisasi dan tugas kerja?
Jawaban: “Pada awalnya sudah dibuat struktur organisasi, namun dengan berjalannya waktu dan masing –masing mempunyai kesibukan yang lain,tugas-tugas akhirnya sedikit terganggu dan akhirnya saya yang harus membereskannya.”
5. Bagaimana BUMDes Harapan Bundar menyusun laporan keuangannya?
Jawaban: Saya kurang paham bagaimana membuat laporan keuangan yang seharusnya teh,jadi selama ini saya membuat secara manual menggunakan buku besar dan membuat laporan laba ruginya yang seadanya.”
6. Bagaimana pendapatan BUMDes Harapan Bundar perhari atau perbulan ?
Jawaban: “untuk pendapatannya kami hitung secara perbulan”
7. Bagaimana BUMDes Harapan Bundar mengakui pelaporan biaya tersebut ?
Jawaban: “Saya menghitung biaya pada saat uang keluar itu saya anggap sebagai biaya dan nantinya akan mengurangi pemasukan dari BUMDes itu sendiri.”
8. Berapakah modal awal BUMDes Harapan Bundar ini dibangun ?
Jawaban: “ada modal sebesar 50 jutaan salah satunya membangun kantor.”
9. Siapa saja yang membuat laporan keuangan tersebut ?
Jawaban: “saya dan ketua yang membuat laporan tersebut.”
10. Bagaimana koordinasi BUMDes pada saat ini ?
Jawaban: “untuk koordinasi BUMDwes pada saat ini masih kurang karena kekurangan orang dan masih belum banyak orang yang bisa mengurus BUMDes ini.”